

BAB II

GAMBARAN KETIDAKSETARAAN GENDER DAN ORGANISASI BMP DI BANGLADESH

Berdasarkan sistematika penulisan, pada bab dua akan dijelaskan tentang gambaran ketidaksetaraan gender dan deskripsi umum organisasi BMP. Fenomena diskriminasi perempuan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Bangladesh pada dasarnya saling berkaitan. Ketika seorang perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif secara terus-menerus, maka resiko atau akibat yang dapat terjadi adalah ketidakseimbangan peran maupun jumlah partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu juga sebaliknya, saat seorang perempuan dipandang memiliki status yang lebih rendah atau tidak setara dengan laki-laki, maka konsekuensi yang mungkin akan diterima perempuan adalah dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki tersebut.

2.1 Fenomena Diskriminasi Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender di Bangladesh

Ketidaksetaraan gender dapat diartikan sebagai sebuah situasi yang diakibatkan karena adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan memanifestasikan dirinya atas perbedaan ras,

budaya, politik, negara dan keadaan ekonomi.¹ Bangladesh merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 160 juta jiwa pada tahun 2017. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 83 juta populasi laki-laki atau setara 50,6% dan 81 juta populasi perempuan yang berarti setara 49,4%.² Berdasarkan hasil survei *World Economic Forum* pada tahun 2007, jika diukur menggunakan *Gender Gap Index* (GGI) Bangladesh menempati urutan ranking ke-100 dari 128 negara. Meskipun berada pada posisi rendah, Bangladesh cenderung mengalami kenaikan peringkat setiap tahun hingga 2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel peringkat di bawah ini dengan menggunakan indikator 0,00 = tidak setara, 1,00 = setara.³

**Tabel 2.1 Peringkat Bangladesh dalam *Gender Gap Index* (GGI):
Perbandingan dari Tahun 2006-2010**

	Total		Partisipasi Ekonomi		Pencapaian Pendidikan		Status Kesehatan		Pemberdayaan Politik	
	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
GGI 2011 (dari 135 negara)	69	0.681	118	0.493	108	0.917	123	0.956	11	0.359
GGI 2010 (dari 134 negara)	82	0.670	117	0.473	108	0.914	122	0.956	12	0.338
GGI 2009 (dari 134 negara)	93	0.653	121	0.455	105	0.911	127	0.950	17	0.294
GGI 2008 (dari 130 negara)	90	0.653	119	0.444	104	0.909	124	0.950	13	0.310
GGI 2007 (dari 128 negara)	100	0.631	116	0.437	105	0.871	122	0.950	17	0.267
GGI 2006 (dari 115 negara)	91	0.627	107	0.423	95	0.868	113	0.950	17	0.267

Sumber: *World Economic Forum Insight Report 2011*.

¹ Jannatul Ferdaush dan K. M. Mustafizur Rahman, *Gender Inequality in Bangladesh*, Published Report (October 2011), Unnayan Onneshan The Innovators, hal. 8.

² Countrymeters, *Bangladesh Population*, diakses dalam <http://countrymeters.info/en/Bangladesh> (09/06/2017, 23:55 WIB).

³ *The Global Gender Gap Report 2015*, Insight Report, World Economic Forum, diakses dalam <http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf> (10/06/2017, 06:21 WIB).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan gender menurut GGI pada tabel di atas adalah empat hal yaitu partisipasi dalam bidang ekonomi, pencapaian pendidikan, status kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik pada perempuan. Berdasarkan tabel di atas juga kita dapat melihat juga bahwa Bangladesh berada pada posisi terendah ketika tahun 2007 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, Bangladesh mengalami penurunan tiga tingkat dari posisi sebelumnya di tahun 2008. Akan tetapi, dua tahun selanjutnya Bangladesh cukup konsisten mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2015, Bangladesh berhasil menempati posisi ke-64 dari 145 negara dengan skor yang mencapai 0,704.

Berbicara mengenai isu gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender menjadi masalah paling penting bagi hampir seluruh negara di dunia.⁴ Dominasi laki-laki di setiap bidang publik maupun privat masih terus terjadi dan bahkan semakin menonjol. Tidak terkecuali perempuan di Bangladesh yang dianggap harus selalu tunduk pada laki-laki, karena perempuan di negara tersebut sangat rentan menjadi korban sistem patriarkal dan mengalami diskriminasi di semua tingkatan. Secara tradisional, peran perempuan di Bangladesh hanya terbatas pada status sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bergantung pada suami mereka.

Sebagian besar keluarga dalam masyarakat Bangladesh masih belum keluar dari norma sosial tradisional dan adat istiadat yang merugikan perempuan seperti praktek pernikahan dini, hal inilah yang kemudian memicu timbulnya bias

⁴ Sheikh Kabir Uddin Haider, *Dimension and Intensity of Gender Inequality in Bangladesh: an Overview*, Journal of Research in Peace, Gender, and Development (JRP GD), Vol. 2, No. 10 pp 203-213 (October 2012), Rajshahi: International Research Journals, hal. 203.

gender baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Adanya pola pikir yang menganggap bahwa perempuan pada dasarnya dilahirkan hanya untuk mengurus rumah tangga saja telah menyebabkan ketergantungan sepanjang siklus hidupnya.⁵ Ketika masih kecil dan remaja, seorang perempuan biasa bergantung pada ayah atau keluarganya. Setelah menikah, ia kemudian akan berada di bawah perwalian suami. Bahkan setelah suaminya meninggal, tanggungjawab atas perempuan bergeser pada anak laki-laki atau keluarga suami yang dipandang lebih memiliki orientasi.

Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan di Bangladesh pada dasarnya telah dimulai sejak awal mereka lahir, sebagai contoh masyarakat cenderung akan menyambut kehadiran bayi laki-laki dengan suara doa yang keras sementara pada bayi perempuan hanya akan memberikan doa lewat bisikan saja.⁶ Selanjutnya, anak perempuan menyadari sepenuhnya bahwa saudara laki-laki lah yang merupakan aset penting dan menjadi harapan orang tua di masa depan. Sedangkan ia hanya beban yang diperlakukan layaknya anggota keluarga tidak tetap. Perbedaan sikap dan perlakuan ini kemudian dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya pola perilaku dan tindakan diskriminatif secara terus-menerus di kemudian hari.

Diskriminasi terhadap perempuan berarti telah menempatkan perempuan pada posisi bawah dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, adanya ketidaksetaraan dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pembangunan suatu negara. Selama dua dekade terakhir, permasalahan

⁵ *Ibid.*, hal. 204.

⁶ *Ibid.*, hal. 205.

diskriminasi perempuan muncul sebagai salah satu isu sosial yang paling menonjol di Bangladesh dan telah menghasilkan subordinasi. Bagaimanapun, peran dan status perempuan Bangladesh didominasi oleh sistem patriarki dan patrilineal.⁷ Agama juga turut mempengaruhi pola tindakan masyarakat, bahkan kelompok konservatif sering menggunakan ideologi agama dalam membela praktek patriarki.

Norma dan sikap patriarki telah menjadi ciri yang melekat pada kehidupan masyarakat Bangladesh, sedangkan usaha dalam mempertahankan status dan posisi antara laki-laki dan perempuan masyarakat biasanya menggunakan argumen agama.⁸ Seorang perempuan Bangladesh diharuskan untuk mengurangi kesempatan belajar, karena mayoritas orang tua beranggapan bahwa pendidikan hanya diperlukan oleh laki-laki. Sejak kecil, perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan kualitasnya. Ciri-ciri sistem patriarki lain yang masih terjadi di Bangladesh antara lain kurangnya kebebasan dan mobilitas bagi anak perempuan untuk melakukan segala hal di luar rumah seperti bekerja. Jika pun seorang perempuan pergi bekerja, mereka sering mendapatkan pelecehan seksual, ancaman dipecat apabila

⁷ Abeda Sultana, *Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis*, University of Dhaka, hal. 11, diakses dalam http://www.bdresearch.org/home/attachments/article/nArt/A5_12929-47213-1-PB.pdf (24/04/2017, 10:48 WIB).

⁸ Nathaniel Adams, *Religion and Women's Empowerment in Bangladesh*, Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, Occasional Paper, December 2015, Georgetown University, hal. 2.

Sebagai bukti, misalnya dalam agama Hindu terdapat budaya *Sati* yakni sebuah tradisi dimana seorang janda terpaksa membakar dirinya sendiri saat pemakaman suaminya. Sedangkan dalam Islam, contoh lain adalah praktek *Purdah* yaitu pengasingan perempuan dimana hal tersebut dilakukan untuk membatasi interaksi antara perempuan dan laki-laki non-mahram. Secara eksplisit, hal tersebut sering dipahami dan digunakan untuk membatasi aktivitas sosial perempuan di ruang publik. Mayoritas laki-laki juga sering menggunakan istilah poligami dan membiarkan pernikahan dini untuk membenarkan sikap dalam praktek sosial.

tidak menaati kemauan atasan mereka, dan mendapatkan upah yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang diberikan.⁹

Pemukulan terhadap istri dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal umum yang mudah dijumpai di kehidupan masyarakat Bangladesh. Perempuan di negara ini juga tidak memiliki hak dan kendali atas properti dan warisan dalam keluarga mereka. Beberapa ayah di daerah pedesaan Bangladesh akan menolak jika mengetahui bahwa bayi yang baru lahir berjenis kelamin perempuan. Bahkan, mereka sering menyalahkan istrinya karena telah memberikan anak perempuan.¹⁰ Tidak jarang hal inilah yang kemudian menjadi pemicu adanya penyiksaan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jika anak laki-laki dipandang sebagai aset yang dapat menunjang kehidupan orang tua di masa mendatang, maka perempuan menurut masyarakat Bangladesh hanya beban dan kewajiban ekonomi yang harus ditanggung.¹¹

Lahirnya anak perempuan dipercaya hanya untuk bagaimana agar dapat menjadi istri yang ideal dan ibu yang baik bagi keluarga. Sayangnya, hal tersebut justru menempatkan posisi perempuan pada situasi yang kurang menguntungkan.¹² Pendidikan formal dianggap tidak perlu dan tidak relevan untuk anak perempuan karena investasi masa depan yang sesungguhnya berada pada anak laki-laki. Oleh sebab itu, pendidikan sekolah menurut masyarakat Bangladesh terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan adalah hanya untuk

⁹ Abeda Sultana, *op. Cit.*, hal 13.

¹⁰ A. M. Sultana and Nor Erlina Bt Mohd Zulkefli, *Discrimination Against Women in the Developing Countries: A Comparative Study*, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 3 (May 2012) pp 256-259, Perak: Sultan Idris University of Education, hal. 257.

¹¹ *Ibid.*, hal. 256

¹² *Ibid.*, hal. 257

laki-laki. Kontrol laki-laki terhadap perempuan ini setidaknya mengindikasikan bahwa hak yang dimiliki perempuan telah terampas. Permasalahan ini pada dasarnya merupakan bentuk konsekuensi dari sistem patriarki yang telah menentukan hubungan kekuasaan dan daya tawar anggota keluarga dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil survei *Violence Against Women (VAW)* pada tahun 2011 di Bangladesh, mengidentifikasi bahwa sebanyak 87% perempuan yang telah menikah mengalami kekerasan rumah tangga. Persentase tinggi tersebut merupakan jenis kekerasan yang lebih didominasi oleh kekerasan psikologi. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan. Sejak tahun 2010, hampir 65% perempuan di Bangladesh telah melaporkan bahwa mereka telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami mereka. Sayangnya, sepertiga dari mereka tidak mendapatkan perawatan medis karena tidak diijinkan dan takut pada suaminya.¹³

Kekerasan psikologi yang dialami perempuan di Bangladesh antara lain berupa ancaman, hinaan, dan intimidasi verbal. Sedangkan kekerasan di luar rumah tangga yang dialami perempuan juga bukan peristiwa langka, di mana mayoritas korban yang lebih rentan adalah kelompok anak muda di bawah usia 29 tahun. Dalam hal ini, perempuan sering menerima berbagai macam kekerasan baik fisik oleh orang tua kandung, orang tua tiri, mertua bahkan guru dan kekerasan seksual oleh selain suami mereka seperti kekasih, anggota keluarga

¹³ Md. Alamgir Hossen, *Measuring Gender-based Violence: Results of the Violence Against Women (VAW) Survey in Bangladesh*, Bangladesh Bureau Statistics (BBS), diakses dalam https://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/Session%203%20Bangladesh%20paper.pdf (24/4/2017, 13:32 WIB).

laki-laki atau teman anggota keluarga laki-laki. Oleh sebab itu, jenis kekerasan tersebut menjadi yang paling dominan di antara jenis lainnya jika dikaitkan dengan konteks kekerasan luar rumah tangga.

Contoh nyata kekerasan fisik yang dialami perempuan di Bangladesh baik di dalam maupun di luar rumah tangga adalah kasus penyalahgunaan bahan kimia. Perempuan sering menjadi korban penyiraman bahan-bahan kimia oleh sebagian besar laki-laki dengan dua alasan yang paling dominan, yaitu penolakan lamaran pernikahan, penolakan berhubungan seksual istri terhadap suami atau pemberian mahar dari perempuan yang dianggap kurang.¹⁴ Bahkan menurut survei *Acid Survivors Foundation* (ASF) Dhaka, kasus penyalahgunaan ini telah meningkat sejak tahun 2000. Sayangnya, para korban kurang mendapatkan kemudahan akses langsung untuk perawatan dokter. Kekerasan yang dialami perempuan ini secara tidak langsung telah mengindikasikan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang berujung pada ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial.

Pada dasarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat ketidaksetaraan gender, misalnya angka kematian, kelahiran, kepemilikan properti, dan keluarga. Dalam kasus keluarga, adanya ketidaksetaraan dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya preferensi laki-laki dalam edukasi, kelahiran atau bahkan dalam pengasuhan anak. Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat ketidaksetaraan adalah kesehatan dan partisipasi

¹⁴ Padmini Murthy dkk, *Impact of Gender-Based Violence, Discrimination, Terrorism, Environmental Factors, and Transnational Trafficking on Women and Girls*, diakses dalam http://samples.jbpub.com/9780763756314/56314_CH02_MURTHY.pdf (26/04/2017, 22:18 WIB).

politik. Ketidaksetaraan gender di Bangladesh yang menempatkan perempuan sebagai korban secara garis besar terjadi di 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Ketidaksetaraan Gender di Bidang Politik

Status perempuan pada kebanyakan negara yang masyarakatnya sedang berkembang secara langsung akan berdampak pada posisi mereka dalam keluarga, berbagai institusi sosial dan administrasi serta proses-proses pengambilan keputusan di bidang politik. Dalam kasus perempuan Bangladesh, selain partisipasi politik perempuan yang kurang dalam hal gerakan nasional upaya kontribusinya juga masih sangat diabaikan.¹⁵ Secara konvensional, politik dalam budaya Bangladesh dipandang sebagai sebuah kegiatan yang didominasi laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan sering tidak dianjurkan untuk berpartisipasi dalam konteks tersebut dan memaksakan peran perempuan yang berbeda dan cenderung disisihkan dari laki-laki.¹⁶ Sistem patriarkal dan patrilineal adalah faktor yang pada kenyataannya mempengaruhi permasalahan tersebut. Kurang adanya kebebasan untuk mengakses informasi dan pengetahuan tentang politik mengakibatkan para perempuan tidak memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tidak adanya dukungan kelembagaan untuk memfasilitasi partisipasi mereka juga turut mempengaruhi jumlah keterwakilan mereka untuk menjadi anggota dewan.¹⁷

¹⁵ Sheikh Kabir Uddin Haider, *op. Cit.*, hal. 209.

¹⁶ Lasna Kabir, *Women's Political Participation in Bangladesh: Rhetoric and Reality*, International Political Science Association (IPSA), Conference Paper, June 2014, University of Dhaka, hal. 15.

¹⁷ Eight Review of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 65th session 24th October-18th November 2016, *The Right to Adequate Food and*

Sedangkan bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan lain yang diterima perempuan Bangladesh dapat dilihat dari keterbatasan akses perempuan dalam urusan politik itu sendiri. Jumlah representasi perempuan pada kursi parlemen yang sedikit menunjukkan situasi perempuan dalam partisipasi pengambilan keputusan juga rendah. Bangladesh pertama kali memberikan kuota kursi parlemen untuk perempuan dalam konstitusi 1972 untuk jangka waktu 10 tahun yang berjumlah 15 dari 300 kursi. Kemudian pada amandemen yang ke-15 pada tahun 2011 meningkat menjadi 50 kursi di tingkat nasional dari total 350 kursi atau sekitar 14% dalam jangka waktu 10 tahun.¹⁸ Pada dasarnya jumlah kuota kursi khusus yang disediakan pemerintah Bangladesh untuk perempuan ini penuh terisi dan bahkan pada kuota kursi umum di parlemen, perempuan menempati sebanyak 20 kursi.¹⁹ Sayangnya, hal tersebut kurang menjamin posisi dan peran perempuan itu sendiri sebagai anggota dewan.

Perempuan juga sering menghadapi banyak kesulitan ketika mereka mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum untuk menduduki kursi parlemen. Perempuan di Bangladesh harus menghadapi kekerasan terutama secara psikologi dari kaum fundamentalis maupun konservatif yang cenderung memiliki prasangka negatif terhadap perempuan dan menciptakan suasana

Nutrition of Women in Bangladesh, diakses dalam http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BGD/INT_CEDAW_NGO_BGD_25432_E.pdf (24/04/2017, 23:48 WIB).

¹⁸ Silja Paasilinna, *Women's Reserved Seats in Bangladesh: A systemic Analysis of Meaningful Representation*, The International Foundation for Electoral Systems (IFES), hal. 3-6, diakses dalam https://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_womens_reserved_seats_in_bangladesh_a_systemic_analysis_of_meaningful_representation.pdf (13/05/2017, 00:51 WIB).

¹⁹ *Ibid.*, hal. 10.

ketidakamanan untuk mencegah partisipasi perempuan di ranah politik.²⁰ Bahkan ketika sebagian dari calon perempuan yang telah terpilih dan menduduki kursi parlemen, mereka tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk turut berpartisipasi dalam agenda pembuatan kebijakan. Selain itu, anggota parlemen perempuan cenderung kurang memiliki basis pekerjaan yang jelas saat menjabat terutama di tingkat *Union Parishad* (UP). Hal ini disebabkan karena masih belum jelasnya peran perempuan dalam kerangka kerja dan deskripsi pekerjaan pada fungsi UP akibat kurangnya kapabilitas yang dimiliki terutama untuk bernegosiasi meskipun telah diberikan jatah kursi tersendiri.²¹

Diskriminasi yang dialami perempuan di bidang politik ini juga disebabkan oleh beberapa partai politik di Bangladesh yang membatasi saat penyeleksian calon kandidat jika diketahui berjenis kelamin perempuan. Misalnya dengan memberikan dan menerapkan berbagai kriteria yang cenderung menyulitkan perempuan. Beberapa partai politik lain di Bangladesh juga terbukti memperlakukan perempuan dengan sikap yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan jika minat perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik berkurang akibat berkecil hati untuk mencalonkan diri pada jabatan dan elit politik.²²

²⁰ Sepideh Labani, dkk, *Regional Gender Programme in South-East Asia – Stage II: Gender analysis of women's political participation in 7 South-East Asian countries: Bangladesh, Cambodia, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, East Timor and Vietnam*, diakses dalam http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Gender_analysis_of_women%27s_political_participation.pdf?revision_id=79226&package_id=79202 (27/09/2017, 01:37 WIB).

²¹ South Asia Sustainable Development Department, *Whispers to Voices Gender and Social Transformation in Bangladesh*, Bangladesh Development Series (BDS), Paper No. 22, March 2008, The World Bank, hal. 11.

²² Nomita Halder, *Female Representation in Parliament: A Case Study From Bangladesh*, New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 6, No. 1 (June 2004) pp: 27-63, New Zealand: Univeristy of Canterbury, hal. 28.

2. Ketidaksetaraan Gender di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan fenomena sosial yang memiliki pengaruh kontrol sangat kuat terhadap masa depan perempuan. Sayangnya, tingkat pendidikan masih sering menjadi hal yang dikecualikan untuk perempuan di Bangladesh. Padahal kurangnya pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghalangi perempuan untuk memperoleh kesetaraan berpartisipasi dalam berbagai bidang sosio-ekonomi lain dan sebagai rekan laki-laki. Padahal pendidikan juga merupakan kunci untuk pemberdayaan perempuan. Selain merupakan hak setiap individu, pendidikan merupakan faktor penting karena mampu mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai ilmu pengetahuan yang telah diterima.

Adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang ini ditandai dengan masih banyaknya perempuan yang buta huruf, putus sekolah, dan jumlah pendaftar siswa perempuan di tingkat sekolah formal maupun universitas juga sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingginya tingkat buta huruf perempuan di Bangladesh jika dikategorikan berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu anak-anak, remaja dan dewasa. Namun sebagian besar fenomena tersebut terjadi pada orang dewasa.

Tabel 2.2 Jumlah Rata-rata Angka Melek Huruf Penduduk Bangladesh Berdasarkan Jenis Kelamin

Indikator	Tahun	Jenis Kelamin	Data (%)
Angka Melek Huruf pada Orang Dewasa (15 Tahun ke atas)	2000	Laki-laki	47.3
		Perempuan	35.8
		Total	41.6
	2001	Laki-laki	50.3
		Perempuan	31.4
		Total	41.1
		Laki-laki	46.3

	2002	Perempuan	32.0
		Total	38.8
	2005	Laki-laki	47.0
		Perempuan	36.7
		Total	41.5
	2006	Laki-laki	58.5
		Perempuan	48.8
		Total	53.7
	2007	Laki-laki	63.1
		Perempuan	53.5
		Total	58.3
	2008	Laki-laki	61.3
		Perempuan	52.6
		Total	56.9
	2009	Laki-laki	62.6
		Perempuan	54.3
		Total	58.4
	2010	Laki-laki	62.9
		Perempuan	55.4
		Total	58.6
	2011	Laki-laki	62.5
		Perempuan	55.1
		Total	58.8

Sumber: Main Education Data in Bangladesh, UNESCO Dhaka Office dan Sample Vital Registration Survei 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam permasalahan buta huruf di Bangladesh. Tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, di mana jumlah selisih paling tinggi terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 18,9% dan justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya memiliki selisih 11,5% pada tahun 2000. Sedangkan jumlah selisih paling rendah terjadi pada tahun 2011 yakni hanya sebesar 7,4%.

Meskipun mengalami kenaikan yang stabil tingkat angka melek huruf pada perempuan di Bangladesh sejak tahun 2001 hingga 2011 akan tetapi dalam tahun-tahun tersebut masih terdapat selisih angka melek huruf yang cukup besar.

Adanya ketimpangan angka melek huruf pada penduduk Bangladesh jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin ini membuktikan bahwa posisi perempuan masih di belakang daripada laki-laki. Fakta tersebut juga dapat dilihat dari jumlah angka putus sekolah yang lebih di dominan perempuan. Ketidaksetaraan gender akibat buta huruf pada perempuan rata-rata terjadi pada tingkat usia pendidikan menengah pertama dan atas di mana hal tersebut telah menjadi tantangan serius Bangladesh untuk terus memastikan setiap hak pendidikan anak.²³

Terkait kasus angka putus sekolah dan pengulangan kelas pada kenyataannya masih menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Bangladesh. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terkait permasalahan tersebut, beberapa di antaranya adalah pada anak itu sendiri seperti kesehatan yang buruk akibat kekurangan gizi dan kurangnya motivasi belajar.²⁴ Faktor lain yang turut mempengaruhi misalnya kondisi rumah tangga seperti migrasi, pekerja anak dan kemiskinan. Selain itu, kenyataan anak putus sekolah di Bangladesh juga akibat dari adanya budaya yang telah tertanam pada realitas kehidupan masyarakat. Norma, nilai, keyakinan, tradisi dan praktek sosial yang berbeda memiliki elemen diskriminatif yang merintangai anak perempuan untuk belajar.²⁵ Berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah Bangladesh pada tahun 2008, menunjukkan bahwa hanya sekitar 55% siswa (43% laki-laki dan 57% perempuan) yang

²³ UNESCO Bangladesh, *Enhancing Access to and Retention of Girls and Women in Education and Gender Equity of Teachers under the UN Joint Programme on Violence Against Women (JP VAW)*, diakses dalam http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dhaka/pdf/EDU/gender_study_report.pdf (10/05/2017, 18:57 WIB).

²⁴ Ricardo Sabates dkk, *School Drop Out in Bangladesh: New Insights from Longitudinal Evidence*, The Consortium for Educational Access, Transitions and Equity (CREATE), Research Monograph No 49, October 2010, University of Sussex, hal. 1.

²⁵ *Ibid.*, hal. 3.

berhasil menuntaskan pendidikan ke tingkat akhir sekolah dasar. Sedangkan 45% lainnya cenderung putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.²⁶

Tabel 2.3 Kondisi Pendidikan pada Siswa Sekolah Menengah (Kelas 6-10) di Bangladesh

Tahun	Jenis Kelamin	Yang Menyelesaikan Pendidikan (%)	Tingkat Putus Sekolah (%)	Yang Melanjutkan Pendidikan (%)
1999	Laki-laki	38.51	61.49	62.55
	Perempuan	31.72	68.28	61.91
	Total	35.32	64.68	62.30
2000	Laki-laki	32.22	67.67	66.19
	Perempuan	28.89	76.11	64.00
	Total	28.24	71.76	65.37
2001	Laki-laki	20.27	79.73	58.65
	Perempuan	13.89	86.02	55.67
	Total	17.16	82.84	57.27
2002	Laki-laki	30.87	69.13	61.75
	Perempuan	19.23	80.77	54.31
	Total	24.79	75.21	57.89
2003	Laki-laki	19.53	80.47	50.75
	Perempuan	13.74	86.26	48.30
	Total	16.57	83.43	49.38

Sumber: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) 2004

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu empat tahun jumlah siswa perempuan yang menyelesaikan pendidikan tingkat menengah cenderung menurun, sementara tingkat putus sekolah pada perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tingkat universitas ketimpangan terlihat dalam jumlah pendaftaran calon mahasiswa perempuan dan laki-laki. Jenis ketimpangan lain ditunjukkan dalam jumlah dosen perempuan di Bangladesh, di mana persentasenya hanya mencapai 23,7% atau setara 80 orang saja pada tahun 1998.

²⁶ *Ibid.*, hal. 7.

Jumlah ini juga masuk dalam kategori lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangganya seperti India yang mencapai 36,8% atau setara 1.211 orang.²⁷

Adanya fenomena tingkat putus sekolah yang terjadi pada perempuan di Bangladesh sendiri sebagian besar disebabkan oleh adanya pernikahan dini. Sedangkan pada laki-laki cenderung disebabkan karena masuknya sebagian siswa pada pasar tenaga kerja.²⁸ Pada dasarnya dibalik permasalahan putus sekolah, salah satu faktor yang cukup kompleks adalah keterlambatan usia pada awal masuk sekolah, hal ini kemudian didukung dengan adanya pernikahan dini yang semakin mempersulit siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan survei pemerintah Bangladesh pada tahun 2011, antara tujuh sampai sembilan persen anak-anak berusia 9-10 tahun tidak bersekolah.²⁹ Hal tersebut kemudian berdampak pada pembuktian bahwa sebagian besar anak akan mencapai usia remaja ketika baru menyelesaikan pendidikan dasar saja.

Untuk permasalahan jumlah pendaftar dalam pendidikan formal, di tingkat pra-pendidikan, tingkat dasar maupun universitas jumlah laki-laki masih lebih banyak. Pada tingkat universitas, tahun 2001 di antara jumlah mahasiswa universitas negeri di Bangladesh hanya 24,3% adalah perempuan. Sisanya, sekitar 75,7% atau sekitar tiga kali lipatnya adalah pendaftar berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pendaftar pelajar di Bangladesh rata-rata memang mengalami kenaikan meskipun tidak cukup signifikan. Akan tetapi, hal tersebut hanya terjadi pada

²⁷ Syeda Qudsia Batool dkk, *Gender and Higher Education in Pakistan*, International Journal of Gender and Women's Studies, Vol. 01, No. 01 (June 2013) pp. 15-28, USA: American Research Institute for Policy Development, hal 26.

²⁸ Kavin Wetkins, *Accelerating Progress to 2015 Bangladesh*, UN Special Envoy for Global Education, Working Paper, April 2013, The Good Planet Foundation, hal. 6.

²⁹ *Ibid.*

angka partisipasi di tingkat dasar, pendaftaran pada tingkat perguruan tinggi bahkan tidak mengalami peningkatan.³⁰

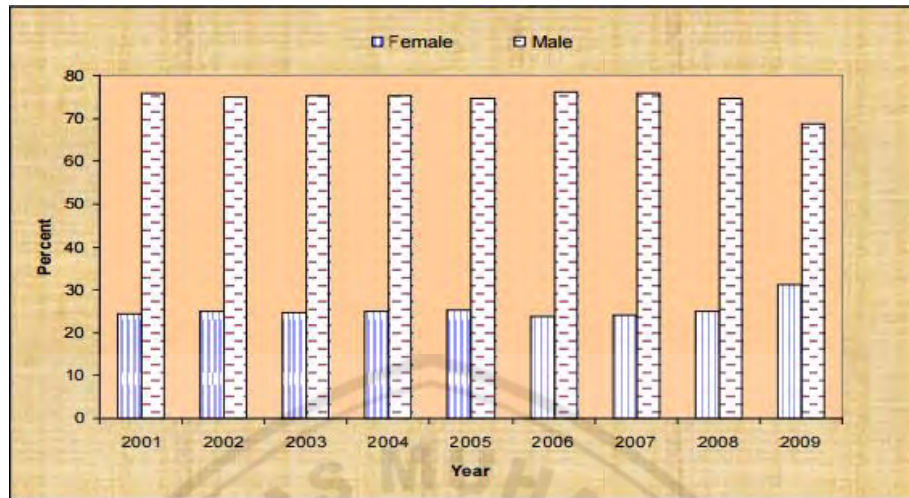
Sedangkan menurut buku statistik Bangladesh pada tahun 2010, presentase jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan di tingkat universitas negeri adalah 59,99% dan 40,01%.³¹ Salah satu faktor ketimpangan jumlah tersebut adalah latar belakang sosio-ekonomi masing-masing mahasiswa yang berbeda-beda. Misalnya akibat faktor kemiskinan, ketertarikan orang tua terhadap pendidikan perempuan masih rendah, pernikahan dini, serta masih bertahannya norma gender yang cenderung konservatif di Bangladesh. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, inti dari penyebab fenomena ketidaksetaraan ini ialah adanya gagasan bahwa perempuan diharapkan memiliki status sosial, kasta, status pekerjaan, dan pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki terutama pada kehidupan rumah tangga. Praktek ini biasa dikenal dengan istilah “*hypergamy*” dan sayangnya praktek tersebut masih diterima luas di budaya Asia Selatan termasuk Bangladesh.³²

³⁰ Jannatul Ferdaush and K. M. Mustafizur Rahman, *op. Cit.*, hal. 5.

³¹ *Women in Higher Education in Bangladesh*, Thesis Paper, diakses dalam <http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/women-in-higher-education-in-bangladesh.html> (11/06/2017, 01:09 WIB).

³² Niels-Hugo Blunch and Maitreyi Bordia Das, *Changing norms about gender inequality in education: Evidence from Bangladesh*, Journal of Demographic Research, Vol. 32, No. 6 (January 2015), pp 183-218, Germany: Demographic Research, hal. 189.

Grafik 2.1 Persentase Pelajar yang Terdaftar di Tingkat Universitas Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) 2011

Grafik 2.1 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, terutama pada tahun 2001. Dalam kurun waktu delapan tahun tersebut juga dapat dilihat bahwa baik keduanya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten. Jika mahasiswa laki-laki cenderung menurun dari tahun 2001-2009, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perempuan. Mahasiswa perempuan justru cenderung meningkat meskipun pada tahun 2006 sempat mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2009 mampu mencapai kenaikan paling signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Ketidaksetaraan Gender di Bidang Status Kesehatan

Kondisi kesehatan perempuan di Bangladesh pada umumnya dapat dikatakan memprihatinkan. Banyak anak perempuan di Bangladesh mengalami gizi buruk akibat kurangnya asupan nutrisi yang tidak memadai dan masalah kesehatan seperti anemia, kehamilan multipel, bahaya aborsi, dan lain-lain. Tidak

adanya perhatian dalam usaha pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari jumlah asupan kalori yang dikonsumsi perempuan, yakni hanya berkisar 91559k.cal yang lebih rendah 1972k.cal daripada laki-laki. Selain itu, angka harapan hidup perempuan (60,5 tahun) juga lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki (60,7 tahun) Tingkat angka kematian ibu yang tinggi dan banyaknya berat badan perempuan Bangladesh yang rata-rata hanya 40,9 kg di mana artinya kurang dari kebanyakan berat badan rata-rata perempuan dunia ketiga pada umumnya.³³

Sanitasi yang buruk dan asupan gizi makanan yang rendah telah mengakibatkan kondisi perempuan Bangladesh pada posisi dengan daya tahan tubuh yang rendah dan rentan penyakit. Akibatnya angka kematian perempuan menjadi tinggi daripada laki-laki. Urusan rumah tangga dan tanggung jawab atas setiap anggotanya bagi sebagian masyarakat Bangladesh dipandang sebagai tugas tradisional perempuan. Oleh sebab itu, dalam hal makanan perempuan harus menunggu seluruh anggota menyelesaikan makanan mereka terlebih dahulu sebelum akhirnya giliran perempuan tersebut.³⁴

Selain dipandang memiliki status lebih rendah dari laki-laki, kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga juga menjadi faktor keterbatasan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Batasan untuk pergi keluar rumah yang diberikan laki-laki terutama suami mengakibatkan perempuan tidak memiliki pilihan dan telah menciptakan kesulitan untuk memperoleh akses kesehatan. Dalam kehidupan pedesaan, perempuan lansia yang

³³ Sheikh Kabir Uddin Haider, *op. Cit.*, hal 209.

³⁴ Mu. Miznanur Rahman Khandaker, *Gender Discrimination in Healthcare Spending in the Household and Women's Access to Resources: Perspective of Bangladesh*, Univeristy of Tokyo, diakses dalam http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_5a.pdf (12/05/2017, 01:01 WIB).

menjadi anggota keluarga senior bahkan harus meminta izin pada suami atau anak laki-laki mereka hanya untuk mendapatkan perawatan medis. Sayangnya, tradisi tersebut masih terus berlanjut ke norma-norma parokial yang mengakar dalam masyarakat Bangladesh.³⁵

Tabel 2.4 Peran Perempuan dalam Pembuatan Keputusan Terkait Urusan Rumah Tangga dan Sosial (N=85)

Proses Pembuatan Keputusan	Perempuan		Laki-laki	
	Angka	Persentase	Angka	Persentase
Perencanaan keluarga	35	41	50	59
Pembelian alat kesehatan	26	31	59	69

Sumber: Sample survey 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa meskipun perempuan pada awalnya dipandang harus bertanggung pada urusan keluarga dan rumah tangga akan tetapi pada kenyataannya peran laki-laki masih mendominasi. Bahkan dalam hal urusan perencanaan dan pengeluaran rumah tangga peran laki-laki masih lebih besar daripada perempuan. Sedangkan dalam konteks mengurus anak oleh perempuan menjadi satu-satunya hal yang persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini juga turut membuktikan bahwa perempuan tidak hanya memiliki keterbatasan akses di ranah publik bahkan dalam urusan privat atau rumah tangga posisi dominasi laki-laki masih sangat tinggi di Bangladesh.

4. Ketidaksetaraan Gender di Bidang Lapangan Kerja

Adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan berpartisipasi di bidang ekonomi pada dasarnya sangat berkaitan pada

³⁵ Muhammad Hamiduzzaman dkk, *Factors Impacting on Elderly Women's Access to Healthcare in Rural Bangladesh*, Indian Journal of Gerontology, Vol. 30, No. 2, pp. 235-260 (June 2016), Australia: Flinders University, hal. 244.

jumlah angka tenaga kerja. Pada usia kerja (16-65) baik yang telah ataupun sedang mencari pekerjaan, secara aktif jumlah partisipasi ekonomi laki-laki di Bangladesh lebih banyak daripada perempuan. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja perempuan mengalami peningkatan yang lebih signifikan daripada laki-laki.³⁶

Tabel 2.5 Tenaga Kerja yang Aktif Secara Ekonomi (Dalam Jutaan)

	2002-2003	2005-2006	2009-2010	2012-2013
Laki-laki	36	37.30	39.50	42.5
Perempuan	10.3	12.10	17.20	18.2

Sumber: *Labor Force Survey Bangladesh 2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa meskipun terdapat ketidaksetaraan jumlah yang cukup tinggi pada angka tenaga kerja akan tetapi baik pada laki-laki maupun perempuan telah mengalami peningkatan jumlah angka tenaga kerja dari tahun 2002-2013. Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan adanya jaminan perlakuan yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Bukti adanya bentuk ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dalam hal pekerjaan ini misalnya pada permasalahan upah. Menurut hasil survei *Bangladesh Occupational Wage* pada tahun 2007 menunjukkan bahwa upah rata-rata per jam angkatan kerja ialah sangat rendah yakni sekitar 16,8 Taka atau setara 25 sen/jam dalam US\$ tahun 2007. Sedangkan pada laki-laki rata-rata yang didapat adalah 17,2 Taka/jam sedangkan perempuan 14,2 Taka/jam.³⁷ Sebagian besar angkatan kerja perempuan di Bangladesh bekerja di sektor pabrik tekstil dan pakaian yang telah menjadi orientasi negara tersebut.

³⁶ Farhana Mahmood and Sonia Rezina, *Gender Disparity in Bangladesh and Its Impact*, Scholar Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 2 (2016) pp. 27-34, Dhaka: Scholar Journal, hal. 27.

³⁷ Steven Kapsos, *The Gender Wage Gap in Bangladesh*, ILO Asia-Pacific Working Paper Series, hal. 5, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098063.pdf (12/05/2017, 19:59 WIB).

Sayangnya, adanya kesempatan kerja untuk perempuan justru tidak memberikan upah yang memadai dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan menurut survei pada pertengahan tahun 1990-an, upah harian yang diterima perempuan pada sektor tersebut 40% lebih rendah daripada laki-laki.³⁸

Selain masalah upah, perempuan juga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekerasan selama di tempat kerja. Bahkan tidak jarang para pekerja perempuan menerima pelecehan seksual dari rekan kerja atau bahkan anggota polisi. Oleh sebab itu, banyak kasus yang dapat ditemukan para pekerja perempuan memilih untuk tidak menceritakan atau melaporkan berbagai jenis kasus pelecehan seksual yang diterimanya. Selain dapat membahayakan posisi pekerjaan mereka, hal tersebut juga akan berdampak pada kemungkinan kesempatan mereka untuk menikah.³⁹

2.1.1 Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender di Bangladesh

Berbagai langkah untuk mereduksi tingkat ketidaksetaraan gender di Bangladesh telah diambil oleh pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya hasil yang diberikan tidak cukup memuaskan dan hanya berdampak kecil. Upaya untuk memajukan partisipasi perempuan di ranah publik pun belum mencapai perkembangan maksimal. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keadaan dan masalah ini antara lain:

³⁸ Jane Korinek, *Trade and Gender: Issues and Interactions*, OECD, diakses dalam <https://www.oecd.org/tad/35770606.pdf> (13/05/2017, 00:08 WIB).

³⁹ F. Begum dkk, *Harassment of Women Garment Workers in Bangladesh*, Bangladesh Agricultural University, diakses dalam <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/208605/2/7940-28985-1-PB.pdf> (28/10/2017, 08:56 WIB).

1) Budaya Masyarakat

Secara kultural, Bangladesh adalah masyarakat yang relatif homogen. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan budaya Bengali menjadi dasar konsepsi gender. Tradisi dan kebiasaan masyarakat Bangladesh ini dipengaruhi oleh sejarah asal-usul negara tersebut sebagai pecahan Bengal Timur India.⁴⁰ Sementara Bengal Timur memiliki populasi mayoritas Muslim, ia juga memiliki hubungan budaya yang erat dengan Bengal Barat (Pakistan) dari banyak segi adat istiadat sosial Hindu India. Hal inilah yang kemudian menghasilkan perpaduan antara budaya Bengali dan kepercayaan Islam dalam masyarakat Bangladesh.

Pertemuan tradisi dan praktek Hindu Bengali dengan nilai-nilai Islam ini kemudian memperkenalkan praktek budaya negatif seperti *dowry system* yang merupakan ciri khas masyarakat Hindu. Praktek tradisional lain yang berdampak buruk pada perempuan antara lain mempromosikan praktek purdah dan pembunuhan demi kehormatan. Sedangkan dalam konteks agama Islam, keyakinan masyarakat bahwa 'surga terletak pada kaki suami' telah menghasilkan kesetiaan perempuan yang penuh terhadap keinginan dan keputusan suami tanpa penolakan.⁴¹ Sehingga menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan terutama pendidikan dan pekerjaan.

Selain pengaruh adanya budaya Bengali dan nilai-nilai Islam, faktor diskriminasi dan ketidaksetaraan lain dikombinasi oleh berlakunya sistem

⁴⁰ Savitri Goonesekere, *Harmful Tradition Practices in Three Countries of South Asia: Culture, Human Rights and Violent Against Women*, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Gender and Development Discussion Paper Series No. 21, United Nations, hal. 15.

⁴¹ Sheikh Kabir Uddin Haider, *op. Cit.*, hal 208.

patriarkal. Sistem tersebut telah membatasi perilaku perempuan akibat pola pikir masyarakat Bangladesh yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kemampuan bekerja lebih baik daripada perempuan. Adanya persepsi masyarakat tersebut merupakan korelasi negatif dari adanya sistem patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus pendidikan, orang tua akan lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan bagaimanapun keadaannya. Sedangkan dalam kasus pekerjaan, seorang atasan akan lebih cenderung mempekerjakan laki-laki terlebih dahulu ketimbang perempuan meskipun memiliki kompetensi yang sama.

2) Kurangnya Inisiatif Kebijakan Eksplisit Pro-Gender

Tidak adanya kebijakan yang secara tegas dan efektif memastikan keamanan perempuan baik dalam kehidupan privat maupun publik seperti pendidikan dan pekerjaan memicu langgengnya kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Kurangnya perhatian dan campur tangan dari pemerintah juga menjadi faktor yang menghambat meningkatnya kesetaraan gender. Selain itu, adanya perbedaan tanggapan para pembuat statuta hukum dan kebijakan di Bangladesh terkait pembahasan kebutuhan untuk menghilangkan praktek tradisional dan budaya yang merugikan perempuan juga semakin memperkuat preferensi diskriminasi berbasis gender.⁴² Anak-anak dan perempuan dewasa di Bangladesh cenderung akan berdiam diri di rumah tanpa melakukan hal apapun untuk menjaga diri. Oleh sebab itu,

⁴² Savitri Goonesekere, *op. Cit.*, hal. 75.

permasalahan ini kemudian menjadi pemicu masih adanya ketidaksetaraan gender.

Salah satu contohnya adalah pada sektor pendidikan, secara eksplisit pemerintah telah mengakui pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai usaha memperbaiki diri agar mudah mengakses dunia publik. Berbagai kebijakan telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi perempuan dan mengurangi tingkat putus sekolah. Namun, tidak terdapat evaluasi yang secara fokus dan jelas terhadap kontribusi maupun intervensi untuk mengatasi disparitas gender tersebut.⁴³

3) Struktur dan Institusi Sosial

Kekuatan ideologi sosial masyarakat telah menciptakan perbedaan gender di Bangladesh. Hal ini didasarkan pada tradisi patriarkal yang masih berlaku dan bertahan. Sistem yang telah memastikan praktek dominasi laki-laki terhadap perempuan ini menggunakan media institusi-institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, sistem hukum, politik dan ekonomi. Dalam sistem tersebut menyiratkan kekuasaan laki-laki yang lebih dominan dan penolakan pada perempuan dengan gagasan bahwa mereka berada dibawah kontrol patriarki. Pengendalian terhadap perempuan pada struktur dan praktek patriarki tersebut masing-masing membenarkan dan mendukung subordinasi perempuan. Realitas kehidupan masyarakat Bangladesh yang menyerap nilai-nilai patriarki telah menempatkan perempuan sebagai kaum

⁴³ Sally Baden dkk, *Background Report on Gender Issues in Bangladesh*, BRIDGE Development and Gender, Report No. 26 (August 1994), Brighton: University of Sussex, hal. 51-52.

“minoritas yang kurang beruntung” dan rentan terpinggirkan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.⁴⁴

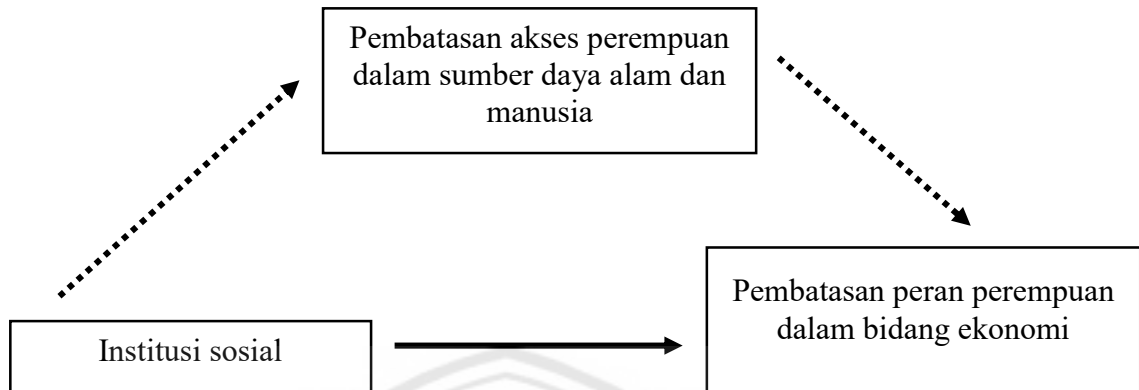
Urusan dalam rumah tangga keluarga di Bangladesh dipandang sebagai ranah hukum pribadi di mana negara tidak memiliki hak untuk terlibat. Fakta kehidupan sehari-hari yang selalu diasumsikan bahwa suami adalah ‘pemilik’ perempuan dan mempunyai hak mendominasi mereka telah membatasi sebagian besar akses perempuan untuk pekerjaan di luar rumah. Sedangkan bagi perempuan yang belum menikah, perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan juga berdampak pada munculnya diskriminasi.

Ketika struktur sosial melanggengkan ketidaksetaraan gender, institusi sosial juga tidak sepenuhnya turut mempromosikan kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari kerangka kerja kelembagaan yang cenderung mengesampingkan perempuan. Institusi sosial dapat membatasi aktivitas perempuan dalam dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Misalnya dalam bidang ekonomi, institusi sosial cenderung akan menolak memperkerjakan perempuan yang meninggalkan rumah dan lebih memilih laki-laki untuk mengelola pekerjaan.⁴⁵

⁴⁴ Abeda Sultana, *op. Cit.*, hal. 14.

⁴⁵ Johannes Jütting and Christian Morrisson, *Changing Social Institutions to Improve the Status of Women in Developing Countries*, OECD Development Centre, hal. 7, diakses dalam <https://www.oecd.org/dev/development-gender/35155725.pdf> (12/06/2017, 08:02 WIB).

Skema 2.1 Pengaruh Institusi Sosial Terhadap Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi



Sumber: Johannes Jütting and Christian Morrisson

Ket:

- > = Dampak langsung
-> = Dampak tidak langsung

Skema di atas menunjukkan bahwa antara institusi sosial dan peran perempuan dalam ranah bidang ekonomi saling berhubungan. Dampak tidak langsung dapat terjadi melalui pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya dan modal dalam upaya pembangunan manusia. Misalnya, saat perempuan dibatasi untuk memperoleh hak pendidikan maka mereka akan kesulitan berpartisipasi di bidang ekonomi karena kurangnya kemampuan yang dimiliki.

4) Pernikahan Dini

Menurut UNICEF, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan dalam konstitusi Bangladesh tentang UU Pernikahan usia minimal anak laki-laki untuk menikah adalah 21 tahun dan perempuan adalah 18 tahun. Akan tetapi, berdasarkan survei *Bangladesh Demographic and Health Survey* (BDHS) menemukan bahwa rata-rata anak

perempuan di Bangladesh menikah pada usia 16,4 tahun.⁴⁶ Prevalensi pernikahan dini di Bangladesh sendiri masih tinggi, secara keseluruhan sekitar 64% perempuan (usia 20-24 tahun) menikah sebelum berusia 18 tahun. Menurut laporan UNICEF yang berjudul “*Ending Child Marriage-Progress and Prospects*” pada bulan Juli 2014 menyebutkan bahwa Bangladesh merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pernikahan dini paling tinggi di dunia. Menurut laporan ini, sekitar 74% anak perempuan yang telah menikah memiliki usia saat masih di bawah 18 tahun, sedangkan lebih dari 20% anak perempuan yang sudah menikah lainnya belum mencapai 15 tahun. Sehingga sebagian besar telah memiliki tiga anak atau lebih sebelum mencapai usia 24 tahun.⁴⁷

Pernikahan dini di negara yang sistem sosialnya masih didominasi patriarki seperti Bangladesh menikahkan anak perempuan memang dianggap sebagai salah satu insentif yang paling umum untuk meringankan beban keluarga. Pernikahan dini merupakan fenomena dan isu yang sangat umum terjadi di Bangladesh. Kasus ini merupakan hambatan paling vital dalam mencapai kesetaraan gender di semua bidang. Karena ketika anak perempuan telah menikah maka secara historis akan membatasi seluruh akses kesempatan dalam setiap bidang dan akan menciptakan situasi rentan perlakuan diskriminasi.

⁴⁶ Nahid Ferdousi, *Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis*, International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 6, No. 1 (January 2014), Bangladesh: Bangladesh Open University, hal. 2.

⁴⁷ *Child Rights Situation Analysis (CRSA) in Bangladesh*, Educo Bangladesh, hal. 47, diakses dalam https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/analisis_situacional_Bangladesh.pdf (12/06/2017, 05:05 WIB).

2.1.2 Dampak Ketidaksetaraan Gender di Bangladesh

Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Bangladesh mengacu pada fakta bahwa norma dan peran gender dimainkan oleh laki-laki dan perempuan tersebut memiliki dampak negatif terhadap kondisi hidup perempuan. Sebagai bentuk keadaan yang kurang mengakui persamaan hak pada perempuan tentu saja hal tersebut berimbas pada perkembangan mereka dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Secara umum, dampak dari adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender ini dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung yakni berakibat pada kesehatan, keterbatasan akses, kurangnya pemasukan pendapatan, kesulitan pangan, kemiskinan, dan lain-lain. Sedangkan dampak tidak langsung dapat dilihat melalui posisi perempuan yang cenderung akan terpinggirkan, kelangkaan sumberdaya manusia yang berkualitas akibat susah akses pendidikan, dan lain-lain

1. Dampak Secara Langsung

Sebagai contoh, adanya *dowry system* di mana perempuan harus memberikan mahar atau membayar mas kawin pada laki-laki menunjukkan bukti bahwa sistem tersebut menyebabkan bias pro-laki-laki. Peran dan kontribusi perempuan di Bangladesh yang terbatas terhadap berbagai sumber daya mengakibatkan mereka sangat rentan terhadap masalah kemiskinan.⁴⁸ Keadaan hidup perempuan yang hanya bergantung pada laki-laki menjadi indikator pemasukan keuangan dalam keluarga. Sedangkan dalam kenyataannya,

⁴⁸ *Bangladesh: Gender, Poverty and the MDGs*, Asian Development Bank, diakses dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32545/country-gender-strategy-bangladesh.pdf> (25/04/2017, 10:17 WIB).

pendapatan yang diberikan oleh laki-laki tidak seluruhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peran aktif perempuan di bidang ekonomi merupakan hal penting yang dapat meningkatkan produktivitas baik dalam skala keluarga maupun nasional. Sebagai bukti, keberhasilan ekonomi Bangladesh sejak tahun 1990-an sebagian besar disebabkan oleh ekspor *Ready-Made Garment* (RMG) ke Eropa dan Amerika Utara di mana sekitar 80-85% pekerja sektor tersebut adalah perempuan.⁴⁹ Perempuan di Bangladesh juga rentan akan bahaya kesehatan dan situasi gizi buruk akibat kemiskinan yang dialaminya. Kurangnya kapasitas untuk memiliki kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh sosiokultural tradisional telah menempatkan perempuan Bangladesh pada kondisi pengangguran musiman. Karena mereka mayoritas yang tinggal di pedesaan hanya bekerja sebagai buruh tani dengan upah rendah yang diberikan.

Ketidaksetaraan angkatan kerja produktif di Bangladesh telah menafsirkan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya partisipasi perempuan sebagai agen ekonomi menyebabkan tidak didapatkannya keuntungan pendapatan yang maksimal. Sehingga ketidaksetaraan gender di Bangladesh pada kenyataannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya keterbatasan akses dan kontrol atas sumber daya untuk perempuan pada kebijakan liberalisasi perdagangan pemerintah pada tahun 1992

⁴⁹ Sameer Khaliwada, *A Quiet Revolution: Women in Bangladesh*, International Labour Organization (ILO), diakses dalam http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_234670/lang--en/index.htm (25/04/2017, 11:11 WIB).

mengakibatkan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak merata.⁵⁰

Masyarakat pedesaan Bangladesh kemudian cenderung bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih menguntungkan. Sayangnya, mereka justru tidak dapat menyesuaikan diri dan menjadi penghuni liar di daerah kumuh dengan masih menjadi orang miskin. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya keterampilan dan kemampuan yang pada dasarnya menjadi daya tawar seseorang untuk mencari pekerjaan. Perempuan yang bermigrasi dari pedesaan ke daerah perkotaan tanpa dibekali keterampilan dan kemampuan yang cukup justru semakin mengancam kondisi mereka. Perempuan hanya akan berada pada situasi dengan segala fasilitas minim nantinya. Perempuan miskin perkotaan tinggal dalam kehidupan rumah tangga dengan penyediaan air yang tidak memadai dan sanitasi serta drainase yang buruk atau bahkan tidak mendapatkan pelayanan sosial sama sekali.⁵¹

Masalah-masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan gender di Bangladesh pada akhirnya menjadikan sebagian perempuan sadar akan keterampasan haknya dalam bermasyarakat. Gagasan dan pemikiran-pemikiran untuk bergerak menuntut kesetaraan tersebut dilakukan melalui pembentukan sebuah organisasi. Karena dengan membentuk sebuah organisasi atas dasar idealisme kelompok yang sama, apa yang menjadi tujuan utama dipandang dapat lebih mudah tercapai. Hal

⁵⁰ Mohammad Mafizur Rahman, *Trade Liberalization and Gender Gap: Bangladesh Experience*, University of Queensland, diakses dalam <http://www.etsg.org/ETSG2011/Papers/Rahman.pdf> (03/05/2017, 10:53 WIB).

⁵¹ K.M. Mustafizur Rahman dan Ayub Ali, *Women and Poverty*, Report for a Forthcoming Book "Institutions Matter: State Women in Bangladesh 2013", March 2013, Unayyan Onneshan The Innovators, hal. 10.

ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penginstitutionan gerakan perempuan di Bangladesh. Sehingga terbentuk berbagai organisasi perempuan yang melakukan misi dan agenda demi tujuan bersama.

2. Dampak Secara Tidak Langsung

Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh telah menjadi salah satu hambatan perempuan untuk berpartisipasi pada sektor publik. Ketika anak perempuan telah menikah maka kehidupan rumah tangga sepenuhnya tidak dapat dikesampingkan. Akibatnya, anak perempuan akan mengalami kesulitan mengejar pendidikan mereka. Bahkan seorang anak perempuan akan ditolak dan dikeluarkan dari sekolah jika ditemukan adanya kemungkinan sebuah pernikahan. Selanjutnya, perempuan juga akan mengalami kesulitan berpartisipasi dalam hal pekerjaan karena kurang memiliki pengetahuan serta keterampilan. Anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan cenderung akan dikurung dan terisolasi di dalam rumah tangga. Kesejahteraan yang seharusnya didapat oleh anak perempuan justru mengalami ketidakpercayaan bahwa pada dasarnya mereka memiliki potensi diri yang berkualitas sama dengan laki-laki. Akan tetapi, diskriminasi dan kesenjangan yang dialami berujung pada pembatasan kemampuan untuk dipekerjakan.

Sifat patriarki dan peran spesifik gender perempuan Bangladesh sebagai ‘perawat’ keluarga membuat mereka membuat mereka tidak dapat meninggalkan rumah sehingga menambah kerentanan kondisi hidup yang berbahaya dan

cenderung terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat.⁵² Adanya fenomena ketidaksetaraan di Bangladesh ini pada kenyataannya juga berakibat pada perubahan kebijakan baik secara makro ataupun mikro bagi perempuan. Misalnya dalam sektor ekonomi, data dari *Census of Manufacturing Industries* (CMI) menunjukkan bahwa lapangan kerja perempuan sebagai persentase total pekerjaan di semua industri yang tercakup oleh CMI meningkat dari 3,04% di tahun 1985-86 menjadi 15,29% di tahun 1991-92 akibat adanya permintaan untuk memperbaiki posisi perempuan di pasar tenaga kerja.⁵³

2.2 Deskripsi Umum Organisasi *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP) di Bangladesh

2.2.1 Sejarah Terbentuknya Organisasi BMP

Secara eksplisit, pada awalnya sejarah aktivitas gerakan perempuan di Bangladesh terjadi pada tahun 1969-1970, di mana gerakan perempuan tersebut memiliki jalinan hubungan yang erat dengan gerakan nasionalis. Organisasi perempuan *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP) jika ditinjau meneurut sejarah sebelumnya merupakan *East Pakistan Mahila Parishad* (EPMP) yakni sebuah gerakan non-kerjasama untuk melawan pemerintah Pakistan Barat. EPMP didirikan pada tanggal 4 April 1970 di bawah kepemimpinan Sufia Kamal⁵⁴ dan

⁵² Zayed Sharmin dan Mohammad Samiul Islam, *Consequences of Climate Change and Gender Vulnerability: Bangladesh Perspective*, Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS), Working Paper No. 6, January 2013, Bangladesh Development Research Center (BDRC), hal. 6.

⁵³ *Impact of Structural Adjustment Policies on Women*, diakses dalam http://www.saprin.org/bangladesh/research/ban_gender.pdf (10/07/2017, 12:45 WIB).

⁵⁴ Sufia Kamal merupakan seorang penyair Bangladesh, pejuang kebebasan perempuan dan aktivis politik. Ia adalah seorang yang cukup memiliki pengaruh pada gerakan nasionalis Bengali pada tahun 1950 dan 1960-an, Sufia Kamal juga merupakan tokoh penting dalam upaya kemerdekaan

Maleka Begum. Selama upaya perlawanan rezim setiap organisasi politik dan sosial menamakan diri mereka dengan “*Shongrami*” yang berarti revolusi. Salah satunya adalah *Mahila Parishad* yang juga menggunakan istilah tersebut menjadi *Mahila Shongram Parishad* (MSP) sebagai wujud strategi dan bentuk gerakan massa untuk negara baru.⁵⁵

Maleka Begum merupakan mahasiswa Universitas Dhaka pada waktu itu dan merupakan anggota *Student Union* (bagian dari Partai Komunis Pakistan Timur) yang aktif pada isu-isu nasionalis. Target utama dari organisasi ini adalah membawa lebih banyak perempuan untuk mendukung usaha kemerdekaan. Ide ide feminisme pun mulai lahir saat itu, meskipun tidak terlihat secara terang-terangan akan tetapi kemunculannya terus-menerus tumbuh. Pada awalnya, agenda-agenda spesifik feminis tidak diucapkan secara jelas. Barulah ketika awal tahun 1970, MSP melakukan sebuah petisi untuk menuntut hak politik dan otonomi. Meskipun gerakan perempuan pada saat itu memiliki kedekatan yang cukup melekat dengan gerakan nasionalis, akan tetapi ia sangat menjunjung tinggi identitasnya sebagai organisasi perempuan dan gencar mempromosikan isu partisipasi perempuan dalam ranah politik.⁵⁶ Membawa perempuan dalam politik dianggap sebagai strategi untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam usaha kemerdekaan. Partisipasi perempuan tersebut pada kenyataannya menjadi awal terangkatnya isu-isu tentang perempuan dan menstimulasi pertumbuhan gerakan-gerakan lain.

Bangladesh. Aktivisme feminisnya dimulai sejak periode pra kemerdekaan Bangladesh dan menjadi penggagas berdirinya *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP).

⁵⁵ Ayesha Banu, *Feminism in Bangladesh: 1971-2000 Voices from Women's Movement*, Thesis, Dhaka: Department of Women and Gender Studies, University of Dhaka, hal. 33.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 35.

Pada tanggal 4 April 1970, seluruh anggota MSP memutuskan untuk mengubah nama menjadi *East Pakistan Mahila Parishad* (EPMP). Perubahan ini menjadi titik awal perkembangan gerakan perempuan di kemudian hari, karena pada momen ini muncul keinginan untuk memperluas aktivitas di mana tidak hanya berfokus pada ranah politik. EPMP berusaha memperluas bidang kerja pada aspek sosial seperti melarang pernikahan dini, *dowry system* dan isu-isu terkait organisasi perempuan *All Pakistan Women's Association* (APWA) yang bekerja untuk meningkatkan status sosio-ekonomi dan hak-hak konstitusional perempuan Pakistan. EPMP pun mampu mencapai posisi dimana perempuan dari berbagai kalangan berpartisipasi di ranah politik dan menjadi satu-satunya organisasi perempuan otonom terbesar pada saat itu dan bahkan hingga tahun 2015. Pada tahun 1971 setelah kemerdekaan Bangladesh, EPMP resmi berubah nama menjadi *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP).

BMP memulai aktivitasnya dengan prinsip-prinsip mempromosikan pemberdayaan, pengembangan dan solidaritas perempuan dengan gerakan-gerakan sekuler, demokratis dan progresif. Sedangkan tujuan utama organisasi BMP adalah untuk membangun hak asasi perempuan dan memastikan pengembangan dan kesetaraan untuk perempuan melalui intervensi kebijakan. BMP kemudian menetapkan diri sebagai organisasi lobi dan advokasi yang diwujudkan dalam 12 (dua belas) kategori yakni *Organization, Resist Violence Against Women and Legal Support, Rehabilitation Center (Rokeya Sadan)*,

*Movement, Research, Training and Library, Publication, Mass Media, Health and Environment, Social Welfare, Project and Development, and Networking.*⁵⁷

Pada tahun 1972, para pemimpin dan aktivis BMP menuntut pemerintah agar mengubah undang-undang hak waris, memperkenalkan pemilihan langsung untuk perwakilan perempuan di DPR, dan juga meningkatkan jumlah kursi yang disediakan untuk perempuan di parlemen, meningkatkan kapasitas anggota yang terpilih, serta mengenakan pendidikan gratis untuk anak perempuan di tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian pada tahun 1976-1977, BMP melakukan sebuah petisi untuk menentang *dowry system*. Upaya tersebut akhirnya mencapai keberhasilan, sebuah undang-undang pelarangan *dowry system* ditetapkan pemerintah pada tahun 1980. Dua Peraturan Pemerintah penting lainnya yang disahkan akibat aksi BMP adalah undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1983 dan undang-undang pengadilan keluarga pada tahun 1985.⁵⁸

BMP kemudian mendirikan sebuah tempat penampungan sementara dan pusat rehabilitasi '*Rokeya Sadan*' pada tahun 1984. Tujuannya adalah untuk menyediakan akomodasi bagi anak dan perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia. BMP menyediakan pengobatan, konseling nutrisi, bantuan hukum, melakukan pelatihan kemampuan untuk penghuni *Rokeya Sadan*. Mereka diajarkan mengembangkan keterampilan untuk mata pencaharian mereka seperti menjahit dan membuat kerajinan, mengolah bahan kulit, dan

⁵⁷ *Bangladesh Mahila Parishad*, Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh, diakses dalam http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Mahila_Parishad (02/05/2017, 23:23 WIB).

⁵⁸ *Ibid.*

menjalankan klinik gratis. Selain itu, organisasi tersebut telah memiliki inisiatif untuk merehabilitasi penghuni pengungsian dengan menyediakan lapangan pekerjaan melalui jaringannya. Selain itu, BMP berusaha melibatkan penghuni pengungsian dalam upaya kewirausahaan seperti memasak makanan, membuat makanan ringan, membuat pakaian jadi, mengolah rempah-rempah, mengolah makanan setengah jadi, dan menjalankan kantin. Sebuah pusat penjualan ‘Sristi’ didirikan pada tahun 1999 oleh BMP di Segunbagicha untuk memasarkan produk yang dibuat oleh penghuni *Rokeya Sadan*.⁵⁹

2.2.2 Profil Organisasi BMP

Bangladesh Mahila Parishad (BMP) adalah organisasi perempuan secara sukarela yang berbasis pada hak. Organisasi ini aktif dalam memperjuangkan kesetaraan, kebebasan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan visi politik yang ditunjukkan melalui komitmennya terhadap pemikiran perjuangan kemerdekaan, nasionalisme *Bengali*, demokrasi dan kesetaraan pada masyarakatnya. BMP berfokus pada kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan hak serta martabat dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Selain isu gender, BMP juga menekankan pada promosi perdamaian dan demokrasi untuk membangun masyarakat yang memiliki ekuitas berdasarkan pada *Good Governance*.

⁵⁹ *Ibid.*

Jumlah anggota umum BMP mencapai 135.000 ribu dengan wilayah operasi mencapai 61 distrik atau 2278 lokal unit di tingkat akar rumput.⁶⁰ Sedangkan kriteria keanggotaan BMP adalah perempuan dengan usia minimal 16 tahun dengan status apapun, merupakan penduduk Bangladesh, beragama, dan memiliki komitmen untuk melakukan emansipasi perempuan. BMP sendiri memiliki sepuluh prinsip dalam mengelola dan menjalankan program serta fungsinya baik di tingkat lokal hingga nasional. Prinsip-prinsip tersebut berguna sebagai penentu arah untuk tiap aktivitas yang dilakukan BMP. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (i) Konstitusi, (ii) Pendekatan Partisipatif, (iii) Voluntarisme, (iv) Pendekatan Non-Partisipan, (v) Dinamisme, (vi) Transparansi, (vii) Komitmen, (viii) Kesenjangan, (ix) Jaringan, dan (x) Visi yang Berkelanjutan.⁶¹

BMP memiliki visi “Menegakkan Sekuler, Demokratik, dan Keadilan Negara Berdasarkan Masyarakat yang Manusiawi” dan juga mempunyai dua tujuan yakni umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk emansipasi perempuan melalui pemberdayaan, sedangkan tujuan khususnya sendiri dibagi menjadi tiga yaitu emansipasi perempuan dari diskriminasi, perampasan, eksploitasi, dan keterbelakangan serta penindasan. Kedua, membentuk kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat dan negara. Ketiga, membentuk masyarakat demokratis yang sekuler berdasarkan konsep *Good Governance*.

Sebagai suatu organisasi, BMP memiliki seperangkat target sasaran yang ingin dicapai bersama dengan seluruh anggotanya. Adapun target sasaran dari BMP terdiri dari enam pokok bagian yakni mencegah kekerasan yang terjadi

⁶⁰ *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP), Bangladesh Mahila Parishad diakses dalam <http://mahilaparishad.org/about-bmp/> (03/05/2017, 00:59 WIB).

⁶¹ *Ibid.*

terhadap perempuan, mempromosikan partisipasi perempuan di ranah politik, memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan, penetapan diri BMP sebagai agen lobi dan advokasi, memastikan keberlanjutan kegiatan organisasi, dan membangun masyarakat Bangladesh yang berbasis ekuitas untuk laki-laki dan perempuan.

Demi mencapai enam target sasarannya, BMP fokus melakukan berbagai cara dan langkah strategi untuk menciptakan kesetaraan gender di Bangladesh. Misalnya dengan meningkatkan kesadaran dan memobilisasi opini publik terkait isu-isu perempuan, menyuarakan sikap dan budaya patriarkal dalam masyarakat sebelumnya yang dipandang merugikan perempuan. Selain itu, BMP juga aktif mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di setiap bidang kehidupan baik domestik maupun publik, membentuk pemberdayaan politik dan ekonomi bagi perempuan. Dengan upaya pendekatan terhadap pemerintah BMP mencoba mengusulkan dan turut merumuskan hukum untuk melindungi hak konstitusional perempuan. Sebagai organisasi yang tersebar di berbagai daerah setiap unit cabang BMP dijalankan oleh sekretaris komite pusat yang berjumlah 10-12 anggota.⁶²

Upaya-upaya BMP dalam tuntutan kesetaraan gender di Bangladesh kemudian diaplikasikan melalui berbagai program yang terstruktur. Seperti melakukan intervensi kebijakan terhadap pemerintah untuk lebih mengarusutamakan perempuan dalam proses pembangunan nasional dan membagi kekuasaan yang sama dan efektif untuk perempuan dalam menjalankan

⁶² Annual Report 2015, *Towards Women's Right, Sustainable Development and Humane Society & State*, Bangladesh Mahila Parishad, hal. 19, diakses dalam <http://www.mahilaparishad.org/wp-content/uploads/2016/04/2015-Final-Annual-Report-BMP.pdf> (03/05/2017, 08:51 WIB).

pemerintahan. Selain berbagai intervensi, BMP juga melakukan advokasi sepertiga jumlah kursi yang disediakan untuk perempuan di parlemen dan memperkenalkan pemilihan umum langsung. Advokasi dan *lobby* tersebut dilakukan guna menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pemberdayaan politik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Program lain BMP di antaranya adalah aktif mempromosikan partisipasi perempuan dalam pemilihan politik sebagai kekuatan untuk membangun negara demokratis, sekuler dan ekuitas. Meskipun cenderung memiliki fokus utama pada upaya pemberdayaan perempuan, namun melawan kekerasan terhadap perempuan juga menjadi salah satu program yang dimiliki BMP. Oleh sebab itu, BMP secara giat memberikan dukungan sosial dan hukum untuk perempuan korban kekerasan serta membangun sebuah gerakan untuk permasalahan tersebut. Kesetaraan gender yang menjadi tujuan BMP memiliki arti adanya status hukum dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Sehingga, dalam ranah domestik BMP melakukan advokasi untuk mereformasi hukum dan *Uniform Family Code* (UFC) sebagai bentuk upaya mereduksi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Bangladesh.⁶³

BMP melanjutkan aksi konsistennya dalam melawan kekerasan dengan memberikan layanan dukungan pendamping seperti penyediaan tempat penampungan sementara untuk korban kekerasan, pengobatan, rehabilitasi, dan distribusi bantuan hukum. Sebagai organisasi perempuan, BMP juga turut mengikutsertakan laki-laki dalam gerakannya. Selain untuk menambah kesadaran

⁶³ *Ibid.*, hal. 20.

tentang hak perempuan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi sebagai penggagas persamaan hak asasi manusia. Sedangkan pada anggotanya, BMP memberikan motivasi untuk tetap menjunjung tinggi semangat voluntarisme dan komitmen terhadap hak asasi manusia bagi perempuan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa BMP merupakan organisasi perempuan terbesar di Bangladesh, maka untuk keberlangsungan setiap agendanya BMP secara terus-menerus membangun kapasitas manajemen keuangan dan telah mengembangkan struktur administratif yang terdiri dari 7 (tujuh) lapisan untuk memastikan keefektifan implementasi aktivitas dan program-programnya. Pelaksanaan program dan kegiatan BMP dilakukan melalui kombinasi usaha yang dibuat dari tiap struktur yang memfasilitasi BMP sebagai agen advokasi dan lobi. Pengelolaan organisasi BMP mengikuti sistem yang fleksibel dimana para anggota dapat menunjukkan kinerja kreatif dan inovatif mereka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat Bangladesh, BMP menyediakan program kesadaran gender dan HAM terutama untuk para profesional dan kelompok-kelompok masyarakat. BMP juga berupaya untuk menyatukan gerakan perempuan pribumi dalam pengarusutamaan gerakan perempuan dan menyusun berbagai rencana tindakan untuk mengatasi setiap masalah yang mereka miliki, terutama dalam menangani masalah anak perempuan.

Hingga pada tahun 2015, BMP dipimpin oleh seorang presiden bernama Ayesha Khanam. Menurut Khanam, berbicara tentang ketidaksetaraan gender di Bangladesh baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan ia mengatakan

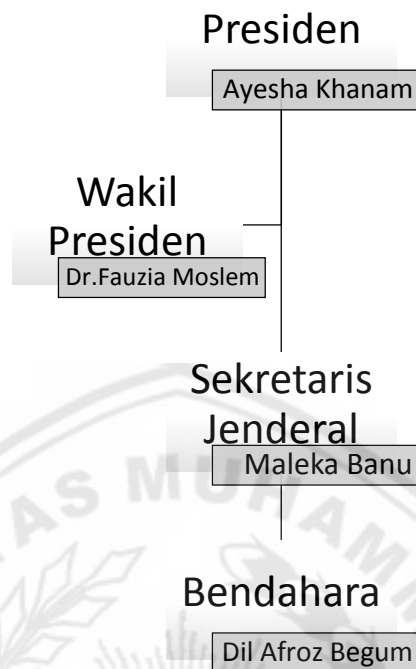
bahwa isu-isu tersebut harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dia juga berpendapat bahwa kebijakan pembangunan perempuan yang telah dirumuskan Bangladesh kurang memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi. Oleh sebab itu, ia menganggap bahwa terkait kebijakan tentang partisipasi perempuan di ranah publik perlu dibawa ke permukaan dan dikaji sekali lagi.⁶⁴

Isu kesetaraan gender yang menjadi tujuan pencapaian utama BMP sebagai organisasi perempuan di Bangladesh muncul pertama kali dengan semangat revolusi yang terlihat dari penggunaan istilah “*Shongrami*” saat awal dibentuk. Hal tersebut mencerminkan rasa ketidakpuasaan terhadap keadaan sosial yang cenderung memposisikan perempuan pada situasi kurang menguntungkan. BMP dibentuk dan menjadi pelopor serta *role model* organisasi-organisasi perempuan lain di Bangladesh. Gaya kepemimpinan BMP juga jelas, di mana memiliki struktur pengambilan keputusan yang hirarkis mulai dari pusat hingga di cabang distrik.⁶⁵ Adanya ketimpangan gender di Bangladesh sendiri selain sebagai tantangan budaya juga sebagai masalah sosial yang membuat BMP melakukan berbagai protes dan upaya untuk memperluas dukungan dan gerakannya. Dengan menggunakan berbagai basis sumber daya, BMP mencoba mempengaruhi publik untuk ikut menciptakan perubahan sosial yang lebih ramah terhadap perempuan.

⁶⁴ Ayesha Kabir, *Sustainable Development Needs Gender Equality, Says CSW Prepare Meet*, diakses dalam <http://unwomen-asiapacific.org/mediaclippings/myFiles/Countries/Bangladesh/2016/02-Feb/Sustainable%20dev%20needs%20gender%20equality,%20says%20CSW%20prep%20meet.pdf> (18/05/2017, 20:54 WIB).

⁶⁵ Sohela Nazneen dan Maheen Sultan, *Mobilizing Support and Negotiating Change: Women's Organizations Building Constituencies in Bangladesh*, BRAC Development Institute, Working Paper No. 06, November 2011, BRAC University, hal 10.

2.2 Skema Kepengurusan BMP



Berdasarkan uraian di atas, BMP yang awalnya hanya sebuah gerakan perempuan non-kerjasama pada faktanya kemudian bertransformasi menjadi suatu organisasi yang tetap melakukan berbagai gerakan aktivitas konkret untuk tujuannya yaitu dalam perubahan sosial. Komitmen BMP tersebut sesuai dengan konsep *Social Movement Organization* (SMO) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam SMO sendiri terdapat dua model yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik berbeda untuk melihat jenis berbagai organisasi yang ada. Pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan secara rinci pengertian *Professional dan Participatory Movement Organization* dalam SMO. Jika melihat dua pengertian tersebut, BMP sebagai SMO masuk dalam kategori *Professional Movement Organization* karena berbagai indikator dan bukti.

Professional Movement Organization jika ditinjau pada karakteristik pertama menunjukkan bahwa organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang

seluruh waktunya digunakan untuk kepentingan anggota dan pencapaian tujuan melalui gerakannya terhadap isu tertentu. BMP sebagai organisasi perempuan terbesar di Bangladesh hanya berfokus pada terciptanya kesetaraan gender dan kesejahteraan kaum perempuan dengan menggunakan nilai-nilai hak asasi manusia dan diimplementasikan melalui berbagai upaya secara konsisten. Keanggotaan BMP yang tidak didasarkan pada formalitas kertas saat memutuskan bergabung menandakan bahwa komitmen untuk bersama menghilangkan segala bentuk ketidaksetaraan pada perempuan jauh lebih penting. Dengan berusaha membangun kesadaran masyarakat secara luas, BMP mencoba membangun kapasitas dan kepercayaan bahwa organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya dengan dukungan kerjasama segala lapisan masyarakat, terutama pemerintah. Melalui upaya di bidang politik BMP mencoba mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah Bangladesh yang dipandang merugikan perempuan dan mendukung kebijakan lain yang dianggap mampu mewakili tujuan kesetaraannya.

Empat ciri di atas setidaknya telah menunjukkan bahwa BMP merupakan SMO dengan kategori *Professional* bukan *Participatory* karena organisasi jenis ini hanya bersifat kontributif. Artinya, keberlangsungan atau berjalannya *Participatory Movement Organization* hanya bergantung pada kesediaan anggotanya untuk melakukan berbagai programnya serta ditambah dengan kurang kuatnya struktur organisasi itu sendiri. Sehingga dalam upaya pencapaian tujuan, *Participatory Movement Organization* dapat dikatakan kurang memiliki komitmen yang besar. Pada umumnya, jenis organisasi ini juga hanya memiliki sedikit sumber daya untuk mendukung kegiatannya. Oleh sebab itu, BMP sebagai

organisasi terbesar dan tertua di Bangladesh justru memiliki sumber daya dari berbagai jenis dan dukungan yang sangat besar. Karena selain merupakan hasil dari dukungan yang diperolehnya, BMP juga melakukan berbagai kerja sama yang secara finansial memberikan dampak positif pada keberlangsungan kegiatannya. Misalnya adalah kerja sama BMP dengan *The Royal Norwegian Embassy* di Bangladesh yang telah mendukung BMP sejak tahun 1990-an dan setidaknya telah menyumbang 85% *budget* untuk BMP⁶⁶.



⁶⁶ Salahuddin M, dkk, *Review of the ongoing project (2005-2009) and appraisal of project entitled promotion and projection of women's human rights in Bangladesh project (2010-2014) of Bangladesh Mahila Parishad (BMP)*, diakses dalam <https://www.norad.no/om-bistand/publikasjon/2010/-review-of-the-ongoing-project-2005-2009-and-appraisal-of-project-entitled-promotion-and-projection-of-womens-human-rights-in-bangladesh-project/> (17/09/2017, 23:02 WIB).